

AGROFORESTRI KALIWU DI SUMBA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS (*Agroforestry Kaliwu in Sumba: A Sociological Perspective*)

Budiyanto Dwi Prasetyo

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,
Jalan Alfons Nisnoni Nomor 7B Airnona, Kota Kupang 85115, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
E-mail: budiyanto_dwiprasetyo@yahoo.com

Diterima tgl 4 Mei 2016, direvisi tgl 14 Mei 2016, disetujui tgl 24 November 2016

ABSTRACT

Agroforestry is one of the popular land management systems in Indonesia. The system helps the farmers to increase agricultural production, social life, and ecological stability. Traditional community in Sumba had been implementing agroforestry for a long time, known as Kaliwu and as a part of the indigenous knowledge. Kaliwu as a system is constructed socially through an intensive interaction between local people and its environment and transmitted from generation to generation. This study aimed to asses sociological aspects in behind Kaliwu practices, which allegedly become key factor the sustainability of this system socially, exist until now. The study was conducted for a year in 2009 in the Waimangura Village, Sumba Island. As social research, data was collected through social survey on 30 respondents, in-depth interview, observation, and literature review. Data was analyzed by using quantitative and qualitative procedures. The results indicated that sociologically, Kaliwu as an authentic knowledge of land management system passed on from generation to generation and constructed along with the socio-historical practices by the local people of Sumba. Social norms (adherence to traditional values, arrangement of labour systems, conflict management) and social institution of farmer group became social factors that play significant role to make Kaliwu sustainable.

Keywords: Agroforestry; traditional; Kaliwu; sociological perspective; Sumba.

ABSTRAK

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang populer di Indonesia terutama di daerah berlahan kritis dan kering. Sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Masyarakat tradisional Sumba mengenal sistem agroforestri dengan nama Kaliwu. Sistem ini telah diterapkan sejak lama dan merupakan bagian dari pengetahuan asli masyarakat Sumba dalam mengelola lahan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek sosiologis di balik praktik *Kaliwu* yang disinyalir menjadi faktor penentu kelestarian sistem ini dari generasi ke generasi. Penelitian dilakukan selama setahun pada 2009 di Desa Waimangura, Pulau Sumba. Pengumpulan data dilakukan melalui survei sosial terhadap 30 responden, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, *Kaliwu* merupakan sebuah sistem pengetahuan pengelolaan lahan yang otentik dan terwariskan secara turun-temurun pada masyarakat Sumba. Kaidah-kaidah sosial (ketaatan pada nilai tradisional, pembagian kerja, manajemen konflik) dan lembaga sosial kelompok tani menjadi faktor sosial yang menopang keberlanjutan *Kaliwu* di tengah masyarakat.

Kata kunci: Agroforestri; tradisional; *Kaliwu*; perspektif sosiologis; Sumba.

I. PENDAHULUAN

Sistem agroforestri tradisional merupakan sistem pertanian yang sudah berumur ratusan tahun dan menjadi model pertanian penting di dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Sistem agroforestri tradisional mendatangkan keuntungan secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya bagi

komunitas pengelolanya (Torres, Maza, Aguirre, Hinojosa, & Günter, 2015; Weiwei, Wenhua, Moucheng, & Fuller, 2014). Misalnya, agroforestry berbasis tanaman mangga (*Mangifera* sp) di Bangladesh telah menyelamatkan para petani yang minim lahan dari kemiskinan relatif (Rahman, Imam, Snelder, & Sunderland, 2012). Pada komunitas Dayak di Kalimantan dikenal sistem

pertanian tradisional berbasis keluarga atau *Kaleka* yang mampu menjaga keanekaragaman hayati sekaligus melestarikan nilai-nilai sosial budaya (Rahu, Hidayat, Ariyadi, & Hakim, 2014). Sistem agroforestri tradisional juga terdapat di daerah lain di Indonesia seperti *Repong Damar* di Sumatera, *Simpunk* di Kalimantan, dan *Kane* atau hutan keluarga di Timor (Kebijakan, 2003).

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), sistem agroforestri tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan istilah *Kaliwu* atau *Kaliwo* (Njurumana, GN & Susila, 2006). Seperti sistem-sistem agroforestri pada umumnya, model pengelolaan *Kaliwu* memiliki manfaat ekologis, ekonomis dan sosial. Secara ekologis *kaliwu* dapat mencegah erosi dan meningkatkan cadangan air tanah. Masyarakat memanfaatkan ruang tumbuh vertikal dan horizontal secara optimal dengan melakukan kombinasi tanaman yang beragam (tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan) (Njurumana, GN & Susila, 2006). Secara ekonomi, hasil yang diperoleh dari tanaman perkebunan dan pangan di *kaliwu* dapat memenuhi kebutuhan hidup subsisten maupun dijual ke pasar (Njurumana *et al.*, 2009). Secara sosial, *Kaliwu* ditempatkan sebagai bagian dari proses interaksi sosial di masyarakat dan mengkonstruksi pengetahuan asli masyarakat secara turun-temurun. Hal ini yang membedakan *Kaliwu* dengan sistem agroforestri modern yang sumber pengetahuannya berasal dari luar masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, *Kaliwu* merupakan media bagi masyarakat Sumba untuk berinteraksi secara sosial, memelihara pengetahuan bercocok-tanam di lahan kering secara tradisional, serta menjamin ketersediaan pangan dan papan. Keberadaan *Kaliwu* telah menjadi ikon identitas bagi masyarakat Sumba.

Terpeliharanya *Kaliwu* hingga kini disinyalir karena adanya unsur-unsur sosiologis di dalam masyarakat sebagai pengelolanya. Aspek sosiologis membicarakan struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya mengenai perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial (Soemardjan & Soemardi, 1964). Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Narwoko & Suyanto, 2006).

Tinjauan sosiologis terhadap praktek agroforestri tradisional, seperti halnya *Kaliwu*, masih belum banyak dibicarakan, sehingga patut dimunculkan pertanyaan: realitas sosiologis seperti apa yang menyebabkan sebuah sistem agroforestri *Kaliwu* bisa tetap lestari? Tujuan penelitian ini adalah mengkaji realitas sosial yang terkonstruksi secara sosiologis di balik praktek *Kaliwu* pada masyarakat Sumba. Sasarannya penelitian ini adalah tafsir sosial atas praktek *kaliwu* beserta faktor-faktor sosial yang menopang keberlanjutan *kaliwu* pada masyarakat Sumba.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama setahun pada tahun 2009 di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan banyaknya jumlah sebaran *Kaliwu* yang dikelola masyarakat, aksesibilitas, dan dinamika sosial masyarakat dalam pengelolaan *kaliwu*.

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat metode pengumpulan data. *Pertama*, metode survei melalui mewawancara responen menggunakan kuisioner (Singarimbun & Effendi, 1999). Responden ditentukan secara *purposive* dengan jumlah sampel sebanyak 30 responen ($n = 30$). Responden merupakan para petani yang terlibat dalam pengelolaan *Kaliwu* secara berkelompok. *Kedua* adalah metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan terhadap narasumber kunci (*key person*), yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang *Kaliwu* di antara populasi. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat (ketua kelompok tani, tokoh agama, dan tokoh adat) dan aparatur desa. *Ketiga*, dengan melakukan metode pencatatan saat observasi di lapangan. *Keempat* dilakukan pendokumentasian terhadap literatur, baik media ilmiah maupun populer seperti jurnal penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, media internet, dan literatur lainnya juga dilakukan untuk memperkuat tinjauan literatur.

C. Analisis Data

Data dari pengisian kuesioner dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif (Usman & Setiady, 2006) dengan memakai program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Penyajian data statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi secara tabel silang (Nurgiyantoro, Burhan, & Marzuki, 2004). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil *in-depth interview*, observasi, dan pendokumentasian literatur. Penyajian hasil analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif naratif guna melengkapi dan mengonfirmasi data dan informasi secara statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang terdiri dari 26 laki-laki dan empat perempuan. Penentuan umur responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yakni dengan memilih responden yang telah menikah dan berusia di atas 25 tahun. Penentuan kelompok umur responden didasarkan pada usia produktif dan kedewasaan seseorang dalam menyikapi masalah. Responden

yang diwawancara mayoritas berumur 25-50 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan responden di-dominasi oleh lulusan SMP. Lebih dari setengah responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari enam orang. Pekerjaan utama seluruh responden adalah petani. Secara lebih jelasnya karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1.

2. *Kaliwu* dan Masyarakat

a. Motif pengelolaan

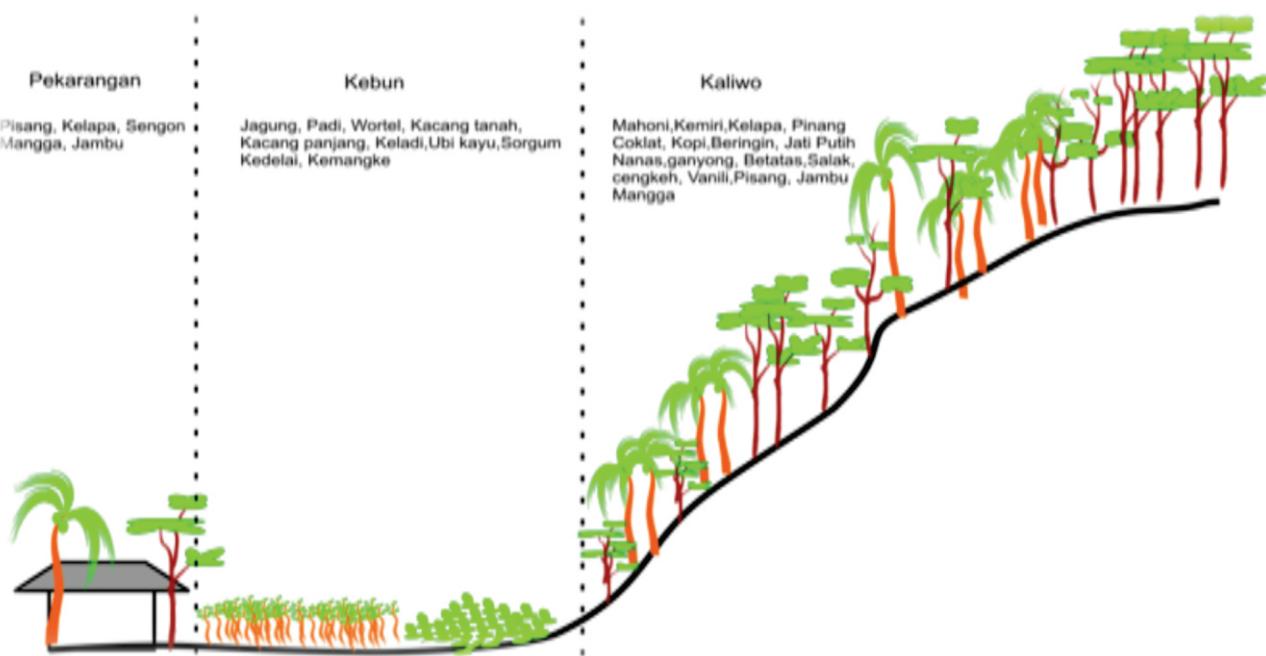
Sistem *Kaliwu* di Waimangura memiliki karakteristik spesifik dalam pemilihan lokasi lahan. Hamparan lahan dibentuk dengan susunan pola tata ruang, dimana lokasi *Kaliwu* yang ditumbuhi tanaman perkebunan berkayu maupun tanaman kehutanan, biasanya diselingi dengan lahan terbuka yang ditanami tanaman pangan seperti jagung, ubi, dan keladi. Lahan terbuka tersebut kemudian disambung lagi oleh *Kaliwu* milik warga lainnya. Hal itu dilakukan untuk efisiensi kerja sebab *Kaliwu* dan lahan tanaman pangan letaknya berdekatan. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari erosi pada tanah di sekitar kebun *Kaliwu* atau di lahan tanaman pangan. Erosi diantisipasi dengan membuat terasering menggunakan batu sebagai penahan teras. Bentangan lahan kaliwu secara melintang diilustrasikan dalam Gambar 1.

Tabel 1. Karakteristik responden.

Table 1. *Characterstic of respondents*

No	Pertanyaan (<i>Questions</i>)	Jawaban (<i>Answers</i>)	Jumlah (<i>Numbers</i>)
1	Jenis kelamin (<i>Sex</i>)	Laki-laki (<i>Men</i>)	26
		Perempuan (<i>Women</i>)	4
2	Umur (<i>Age</i>)	< 25	-
		25-50	23
		>50	7
3	Pendidikan (<i>Education</i>)	Tidak sekolah (<i>Uneducated</i>)	4
		SD tamat (<i>Primary school</i>)	10
		SLTP tamat (<i>Junior high school</i>)	7
		SLTA tamat (<i>Senior high school</i>)	9
		Perguruan tinggi (<i>Tertiary school</i>)	-
4	Jumlah keluarga (<i>Family members</i>)	< 3	-
		3 - 6	11
		> 6	19
5	Pekerjaan utama (<i>Main job</i>)	Petani (<i>Farmer</i>)	30

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*), 2009



Sumber (Source): Njurumana *et al.*, 2009

Gambar 1. Bentang lahan *kaliwu*
(Figure 1. The landscape of *kaliwu*)

Tujuan ekonomis (kebutuhan pangan) dan ekologis (penahanan erosi) kemudian berkembang menjadi murni komersial. Peningkatan produksi panen yang dihasilkan *Kaliwu* ternyata mengalami surplus jika sekadar untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Surplus terjadi terutama untuk komoditi pangan, kayu pertukangan dan kayu bakar. Diketahui terdapat 56,7% responden menyatakan, alasan mereka mengelola *Kaliwu* adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagiannya dijual ke pasar. Hanya sebagian kecil saja yang mengelola *Kaliwu* untuk tujuan subsisten dan sebatas kewajiban budaya meneruskan keberadaan *Kaliwu*.

b. Lahan dan ragam tanaman

Luas keseluruhan lahan, baik lahan kering maupun pekarangan yang dimiliki responden di Desa Waimangura dan dikelola menjadi *Kaliwu* adalah 43,285 ha dengan luas rata-rata lahan yang dimiliki setiap responden adalah 1,610 ha. Lahan yang dikelola sebagai *Kaliwu* tersebut terdiri atas tata ruang berupa hamparan lahan terbuka untuk pertanian tanaman pangan di posisi lahan datar dan rendah, serta tanaman perkebunan dan kehutanan untuk lahan yang berada lebih tinggi posisinya dari lahan pertanian tersebut. Luas kepemilikan lahan oleh responden di lokasi penelitian dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas lahan milik responden Desa Waimangura

Table 2. The number of tenure belong to respondents in Village Waimangura

Lokasi (Location)	Luas kepemilikan lahan (Numbers of tenure) (ha)					
Sumba Barat Daya (Southwest Sumba)	Lahan kering (Dry land)	Rata-rata (Approximately)	Lahan pekarangan (Yard)	Rata-rata (Approximately)	Jumlah lahan kering dan pekarangan (Dryland & yard in total)	Rata-rata (Approximate)
Waimangura	31,500	1,170	11,785	0,440	43,285	1,610

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2009

Jenis tanaman pangan yang menjadi sumber pangan utama adalah padi dan jagung. Tanaman yang dijadikan cadangan pangan kebanyakan dari jenis ubi dan keladi. Pola konsumsi pangan dan cadangan pangan tersebut sudah berlangsung sejak lama, dimana padi dan jagung menjadi pangan utama sedangkan ubi dan keladi menjadi pendukung pangan utama sebagai sumber cadangan pangan. Komoditas perkebunan yang banyak menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga responden adalah jenis buah-buahan seperti pisang, mangga, dan jeruk serta jenis tanaman perkebunan lainnya seperti kopi. Tanaman kehutanan yang menjadi primadona di desa sampel adalah jenis mahoni (*Swietenia mahagoni*). Jenis ini mampu menghasilkan pendapatan bagi responden dengan nilai yang cukup tinggi.

c. Pembagian kerja

Pengelolaan *Kaliwu* di Waimangura tidak dikerjakan sendirian oleh kepala keluarga, melainkan dilakukan melalui pembagian kerja secara tradisional dengan melibatkan anggota keluarga. Peran kepala keluarga atau laki-laki usia produktif sangat sentral dalam pengelolaan agroforestri *Kaliwu*. Kepala keluarga melakukan pekerjaan utama bertani mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan pasca panen. Pada kondisi ini, kultur patriarki terlihat sangat dominan di masyarakat Sumba. Kultur ini menempatkan kepala keluarga (laki-laki usia produktif) sebagai orang yang bertanggungjawab atas pemenuhan pangan keluarga melalui sistem *Kaliwu*. Sistem pembagian kerja di *Kaliwu* dapat dilihat pada Tabel 3.

Kaum perempuan (usia produktif) dan anak-anak tidak dimarginalkan dalam pengelolaan *Kaliwu*. Para istri justru memainkan peran penting. Mereka umumnya bekerja bertani bersama-sama kepala keluarga (laki-laki) di *Kaliwu*. Hanya sebagian kecil saja istri-istri itu yang menyatakan terlibat hanya pada waktu-waktu tertentu saja dalam bercocok tanam. Lebih jauh lagi, anak-anak berusia kurang dari 14 tahun diketahui juga turut membantu bertani meski proporsinya hanya 40%. Karena sebagian besar anak-anak lainnya, menurut pengakuan responden, sengaja dibebaskan dari pekerjaan bertani dan diprioritaskan untuk bersekolah. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dapat terlihat dari pengakuan narasumber tersebut. Ini sama halnya dengan para lansia yang cenderung dibebaskan dari kegiatan pengelolaan lahan. Pada titik ini, tampak bahwa kegiatan di dalam *Kaliwu* memprioritaskan tenaga kerja usia produktif di dalam keluarga pengelola.

d. Lembaga-lembaga sosial

Keberadaan *Kaliwu* mendapat dukungan dari sistem sosial masyarakat desa, terutama lembaga-lembaga sosial baik formal maupun non-formal. Lembaga formal yang mendukung pengelolaan agroforestri tersebut berasal tidak hanya lembaga pemerintahan desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan permusyawaratan desa (BPD), dan organisasi kepemudaan Karang Taruna, tapi juga lembaga non pemerintah seperti Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Kelompok Tani. Lembaga kelompok tani merupakan institusi formal yang paling signifikan perannya dalam mengerakkan masyarakat Waimangura untuk bertani *Kaliwu*.

Tabel 3. Sistem pembagian kerja dalam pengelolaan agroforestri *kaliwu* di Desa Waimangura
Table 3. Division of labour systems within *kaliwu* agroforestry management in Village Waimangura

Pembagian kerja anggota keluarga (<i>Job descriptions among family members</i>)	Jawaban responden (<i>The answers of respondents</i>)			
	Kepala Keluarga/ Suami (<i>Husbands</i>)	Istri (<i>Wifes</i>)	Anak-anak (<i>Children</i>)	Lansia (<i>Elderly</i>)
Bertani (<i>Farming</i>)	100%	83,3 %	-	-
Membantu bertani (<i>Help for farming</i>)	-	10 %	40 %	6,7%
Tidak bertani/tidak ada (<i>Have not taken any role/nothing</i>)	-	6,7 %	60 %	93,3%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*), 2009

Peran lembaga pemerintahan desa lebih difungsikan secara politis dan diplomatik. Fungsi politis adalah menjadikan pemerintah desa sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada pemerintah kabupaten/provinsi/pusat dalam kaitannya untuk melestarikan *Kaliwu*. Fungsi diplomatik adalah sebagai wadah untuk bernegosiasi dan membuka akses informasi, teknologi, dan jaringan kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung pengelolaan *Kaliwu*.

Peran tokoh agama pun sangat sentral di masyarakat karena suaranya selalu didengar warga karena dirinya adalah panutan masyarakat. Status sosial tokoh agama dalam sistem pelapisan sosial adalah setara dengan tokoh adat. Maka dari itu GKS menjadi lembaga keagamaan yang perannya sangat vital dalam memotivasi warga untuk giat bekerja berdasarkan iman yang mereka percaya. Sebagian anggota GKS diketahui pula menduduki posisi penting dalam struktur lembaga kelompok tani.

Kunci kelestarian *Kaliwu* di Waimangura ada di kelompok tani. Kelompok tani yang paling aktif dan giat melaksanakan program-programnya adalah *Mawailo Omma*. Kata *Mawailo Omma* dalam bahasa *Marapu Sumba* berarti “petani harus sudah pergi ke kebun sebelum ayam berkakok”. Nama ini mengandung makna filosofis tentang keharusan masyarakat anggotanya memiliki etos kerja yang tinggi. Etos tersebut masih dipelihara dengan baik oleh warga Waimangura. Sebagian warga masih banyak yang pergi bekerja ke *Kaliwu* lebih dari dua kali dalam sehari. Etos kerja yang tinggi tentunya merupakan modal utama bagi pengembangan agroforestri ke arah yang lebih produktif. Lebih dari itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai sarana untuk bersosialisasi, bermusyawarah, meningkatkan kapasitas keterampilan dan pengetahuan, memobilisasi anggota, serta bekerja sama dengan pihak luar dalam rangka optimalisasi pengelolaan *Kaliwu*.

Sebaliknya, peran lembaga non formal, yakni lembaga adat diketahui tidak terlalu dominan di Waimangura. Lembaga ini cenderung mengurusi acara-acara seremonial seperti perkawinan dan kematian saja. Peran lembaga adat dalam agroforestri *Kaliwu* sudah sangat berkurang dikarenakan masuknya agama Kristen Protestan yang diinisiasi GKS. GKS mampu mendominasi konsepsi warga yang tadinya memeluk kepercayaan tradisional Sumba *Marapu*, menjadi beragama

Protestan. Kondisi seperti itu berdampak pada melemahnya penerapan *pamali*/larangan terkait pengelolaan lingkungan, termasuk *Kaliwu*, yang didasarkan pada kepercayaan adat *Marapu*.

Akan tetapi, melemahnya *pamali* bukan berarti menghilangkan sama sekali praktik *pamali* di kehidupan sehari-hari. *Pamali* yang masih dipegang teguh generasi tua pengikut *Marapu* pada kenyataannya tidak berani ditentang generasi pemeluk Protestan. *Pamali* itu berupa larangan menebang dan atau membakar pohon besar, terutama yang terdapat di dalam lokasi *Kaliwu*. Sebagian besar masyarakat Waimangura masih percaya bahwa melakukan hal tersebut berarti membunuh leluhur mereka sendiri. Di sisi lain, larangan itu sejatinya bertujuan untuk menjaga ekosistem *Kaliwu* sebagai areal pencegah erosi akibat hembusan hujan serta kekeringan yang dapat merusak lahan sumber pangan mereka.

e. Pengelolaan konflik

Konflik merupakan perosalan yang tidak bisa dihindari dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, kebun, dan lahan pertanian. Konflik terjadi karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sebuah realitas (Gritten, Saastamoinen, & Sajama, 2009). Hal itu disebabkan karena adanya kepentingan dan nilai yang berbeda-beda yang dianut kelompok-kelompok yang berkonflik ketika memaknai realitas tersebut. Pada akhirnya, muncul pemaknaan yang berbeda terhadap realitas yang sama. Sebuah versi pemaknaan terhadap realitas biasanya sudah dimanipulasi menurut kepentingan kelompok masing-masing (Gray, 1997 & Moore, 1993 dalam Gritten *et al.*, 2009).

Bentuk konflik menurut Fisher (2001) dalam (Sembiring, Basuni, & Soekmadi, 2010) terdiri atas konflik tertutup (*latent*), konflik mencuat (*emerging*), dan konflik terbuka (*manifest*). Konflik *latent* sering tidak disadari pihak-pihak yang berselisih karena perselisihan tidak sepenuhnya terangkat ke simpul-simpul konflik. Konflik mencuat ketika teridentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan diakui adanya perselisihan dengan subjek perihal konflik yang jelas namun belum berkembang ke arah pertikaian dan mencari jalan penyelesaian. Konflik *manifest* adalah jika kedua pihak yang bertikai sudah berselisih secara terang-terangan, sudah melakukan kompromi namun mengalami *deadlock*. Konflik

jenis ini kerap memicu terjadinya tindak kekerasan (Fisher 2006 dalam Sembiring *et al.*, 2010).

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan *Kaliwu* tergolong ke dalam konflik horisontal. Pertikaian yang terjadi atas dua kelompok masyarakat yang berada dalam struktur sosial yang sama, sebagai warga dan sebagai petani. Persoalan penyerobotan lahan *Kaliwu* dan pencurian ternak adalah representasi konflik yang paling menonjol. Sedangkan untuk intensitas konflik pengelolaan *Kaliwu* di Desa Waimangura selama tiga tahun (2006-2009) diketahui cukup minim. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh mapannya sistem kelembagaan dan sistem hukum yang diterapkan di desa tersebut. Di sisi lain, meratanya hasil panen pada semua lahan *Kaliwu* milik warga menjadi indikasi faktor penekan terjadinya konflik.

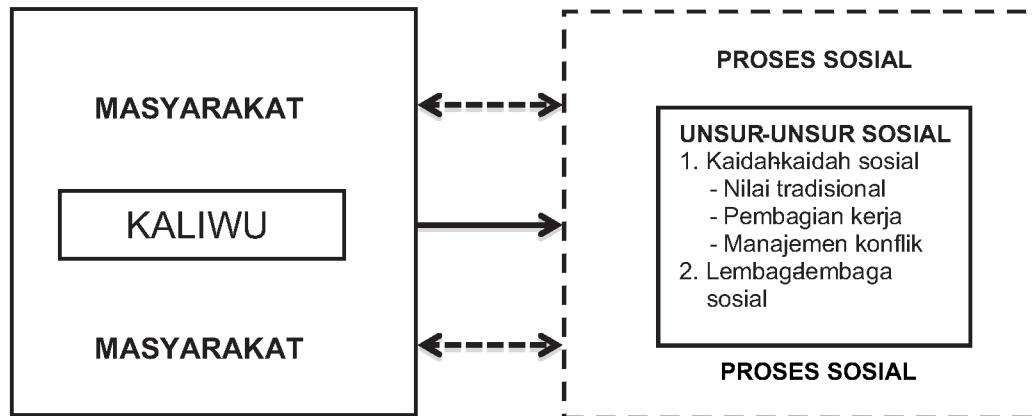
Lahan merupakan hal terpenting pada masyarakat petani. Maka dari itu, potensi konflik yang dapat muncul sewaktu-waktu dapat dipastikan ada kaitannya dengan lahan. Namun, pada lahan-lahan *Kaliwu* di Waimangura, konflik lahan hanya terjadi sekali dalam tiga tahun terakhir, yakni penyerobotan lahan. Hal itu pun dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Itikad untuk menuntaskan konflik secepatnya merupakan karakteristik masyarakat Desa Waimangura yang tentunya menjadi faktor pendorong bagi stabilitas keamanan desa tersebut. Kemungkinan lainnya adalah karena tingginya etos kerja masyarakat yang tidak gemar menghabiskan waktu untuk bertengkar atau berkelahi.

Pencurian ternak adalah bentuk konflik lainnya yang terjadi lima kali dalam tiga tahun terakhir. Bagi

masyarakat Sumba, ternak seperti kerbau jantan, babi taring, kuda, dan sapi merupakan simbol kekayaan seseorang. Harga ternak bisa melambung hingga puluhan juta per-ekor ketika dipakai untuk keperluan upacara perkawinan atau kematian yang masih berorientasi adat. Maka dari itu, pencurian ternak kerap terjadi di kalangan masyarakat Sumba termasuk di Waimangura. Kondisi itu tentu berpengaruh terhadap pengelolaan lahan *Kaliwu*, dimana seseorang menjadi merasa frustrasi ketika simbol adat dan simbol kekayaannya dicuri. Sejauh ini penyelesaian konflik pencurian ternak tersebut diselesaikan melalui musyawarah keluarga hingga tuntas.

B. Pembahasan

Menafsir *Kaliwu* secara sosiologis sangat berbeda dari cara perspektif ilmu-ilmu lainnya yang melihat *Kaliwu* sebagai entitas teknis *an-sich* yang terlepas dari campur tangan manusia. Perspektif sosiologis menempatkan *Kaliwu* sebagai sebuah realitas sosial yang merupakan produk dari perjalanan sosio-historis proses sosial di masyarakat dan bergerak membentuk unsur-unsur dari struktur sosial secara dialektis (Hoult, 1969; Soemardjan & Soemardi, 1964; Veeger, 1985). Lebih jauh lagi, seperti dikatakan P.L. Berger (1985), yang terpenting adalah “menelanjangi” realitas sosial *Kaliwu* dengan tidak hanya mencatat dan menggambarkan realitas sosial *Kaliwu* yang tampak, melainkan menguak fakta-fakta penting di balik realitas sosial *Kaliwu* itu sendiri. Skematika tafsir sosiologis atas *Kaliwu* dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*), 2009

Gambar 2. Skema tafsir sosiologis atas *Kaliwu*.

Figure 2. The scheme of social construction of *Kaliwu*

Keberadaan *Kaliwu* dibentuk oleh proses sosial yang menyejarah yang terjadi pada masyarakat Waimangura. Proses sosial itu berjalan akibat adanya interaksi sosial yang intensif baik antar sesama warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan ekosistem *Kaliwu*. Interaksi yang demikian ini (manusia dengan manusia dan manusia-manusia dengan ekosistem *Kaliwu*), membentuk sebuah konstruksi pola pikir terkait pengelolaan *Kaliwu* yang terwariskan secara turun-temurun dan kemudian menjadi sebuah pengetahuan lokal yang sistemik dan orisinil (*indigenous knowledge*) (Berkes, 2012).

Proses sosial tersebut secara dialektis membentuk unsur-unsur sosial yang tidak lain merupakan pembentuk struktur sosial pada masyarakat itu sendiri. Dalam praktek pengelolaan *Kaliwu*, menggunakan definisi Soemardjan & Soemardi (1964), unsur-unsur sosial yang nampak dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kaidah-kaidah sosial dan lembaga-lembaga sosial.

1. Kaidah-kaidah sosial

Masyarakat memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan sosial yang membuatnya berbeda dari sekumpulan binatang. Kaidah-kaidah sosial itu merupakan seperangkat norma (tertulis maupun tidak tertulis) yang dibentuk dan disepakati bersama untuk menciptakan suatu keteraturan sosial atau *social order* di masyarakat (Narwoko & Suyanto, 2006). *Kaliwu* sebagai realitas sosial merupakan sebuah entitas yang tersusun atas kaidah-kaidah sosial tersebut. Terdapat tiga poin penting terkait kaidah-kaidah sosial yang terdapat dalam pengelolaan *Kaliwu*.

a) Kaidah nilai tradisional

Ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional merupakan motivasi utama dalam mengelola *Kaliwu*. Hal tersebut muncul sebagai bentuk ekspektasi masyarakat terhadap orang tua terutama leluhurnya yang telah mewariskan lahannya untuk dikelola sebagai *Kaliwu*. Menurut Weber (1957) dalam Abdullah (1985); P. Berger, Parera & Luckman (1990) orang tua dan leluhur merupakan orang-orang berpengaruh (*significant others*) yang memiliki kharisma dan mampu menciptakan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai yang hendak dipelihara di dalam masyarakat. Ketaatan terhadap nilai-nilai tradisional dalam

mengelola *Kaliwu* pada masyarakat Waimangura merupakan keberhasilan internalisasi nilai-nilai tradisional untuk menjaga kelestarian *Kaliwu* yang dilakukan oleh *significant others* tersebut.

b) Kaidah sistem pembagian kerja

Kultur patriarki terlihat sangat dominan di masyarakat dalam mengelola *Kaliwu*. Kepala keluarga atau laki-laki dewasa diketahui lebih dominan dan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dalam bertani *Kaliwu*. Akan tetapi, uniknya hal tersebut tidak menampik keberadaan perempuan dewasa atau kaum ibu yang juga merasa bertanggung jawab dalam menunjang kegiatan pertanian yang dilakukan laki-laki kepala keluarga. Meski porsi pekerjaan tidak sepenuhnya dibebankan pada kaum ibu, akan tetapi keberadaan mereka sangatlah sentral dalam mengoptimalkan *Kaliwu*.

Sikap kepedulian kaum ibu muncul bukan karena paksaan, melainkan bentuk dari tanggung jawab *gender*. Sebab pada kenyataanya, kaum ibu yang membantu bertani di *Kaliwu* tetap mengutamakan pekerjaannya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Peran anak-anak yang hanya membantu di *Kaliwu* pada saat panen dan dalam porsi pekerjaan yang ringan serta dilakukan di luar jam sekolah, merupakan realitas tersendiri yang patut pula diperhatikan. Secara tidak langsung, sistem pembagian kerja yang ada di masyarakat Waimangura dalam mengelola *Kaliwu* sudah memerhatikan keberadaan anak sebagai manusia yang patut dilindungi hak-haknya dan bukan untuk dieksplorasi.

c) Kaidah pengelolaan konflik.

Konflik *latent* adalah interaksi sosial yang mengarah pada gesekan-gesekan sosial dalam tensi yang tinggi dan berpotensi menciptakan konflik *manifest* (Druckman & Fast, 2003; Mitchell, 1981). Intensitas konflik *manifest* di Desa Waimangura diketahui sangat minim. Lebih dari itu, konflik yang terjadi dengan cepat dapat terselesaikan melalui musyawarah keluarga hingga tuntas. Etos kerja yang tinggi pada masyarakat Desa Waimangura ternyata menjadi salah satu faktor penekan munculnya konflik *manifest* ke permukaan. Masyarakat lebih memilih bekerja di *Kaliwu* daripada membuang-buang waktu bersengketa atau berkelahi.

Namun, potensi konflik cenderung meningkat ketika musim pesta (perkawinan atau kematian). Konflik biasanya dipicu oleh aksi pencurian terhadap hewan ternak seperti babi bertaring, kerbau jantan, dan sapi. Hal ini menjadikan konflik *latent* sangat berpotensi mencuat menjadi konflik *emerging* dan lebih jauh lagi menjadi konflik manifest ketika memasuki musim pesta.

2. Lembaga-lembaga sosial

Peran lembaga lembaga formal yang ada di lingkup pemerintahan desa, diketahui hanya sekedar menjadi saluran politik masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan aspirasi yang ingin diwujudkan masyarakat Waimangura untuk menunjang pengelolaan *Kaliwu*. Namun, lembaga formal tersebut tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk mengelola *Kaliwu* secara langsung. Pemerintah desa lebih sering kinerjanya terhalang persoalan birokrasi seperti tidak ada anggaran atau tidak ada instruksi dari birokrat di level lebih tinggi. Maka lembaga pemerintah hanya dijadikan simbol desa secara administratif dan jarang terlibat aktif dalam pengelolaan *Kaliwu*.

Masyarakat menggunakan inisiatifnya dengan membentuk kelompok tani *Mawailo Omma* untuk mendukung pengelolaan *Kaliwu*. Kelompok tani menjadi satu-satunya saluran bagi masyarakat untuk merealisasikan segala ide, gagasan, dan aspirasinya secara praktis dan konkret. Keberadaan kelompok tani telah bergerak lebih jauh dari sekadar urusan *Kaliwu*, yakni mampu menciptakan jaringan sosial yang bisa menjadi akses untuk berinteraksi dan menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) lembaga itu terhadap lembaga lainnya. Hal itu dapat dilihat dari komposisi pengurus kelompok tani yang ternyata juga berstatus sosial aktif di lembaga pemerintahan desa, lembaga keagamaan (GKS), dan tokoh masyarakat setempat (kepala dusun).

Keberadaan GKS sebagai lembaga keagamaan yang ada di Waimangura diketahui berperan secara signifikan dalam membentuk etos kerja. GKS mampu menciptakan sudut pandang baru di masyarakat, terutama pada generasi muda, bahwa bekerja adalah ibadah, dan berbagai tahlul dan *pamali* adalah *bi'dah*. Hal ini senada dengan thesis Max Weber tentang “*Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*” (Abdullah, 1979). Meski demikian, masih ditemukan adanya upacara adat Marapu yang digelar oleh generasi tua dan dihadiri jemaat GKS

yang notabene beragama Kristen Protestan. Hal tersebut diakui responden untuk menjaga toleransi dalam berkeyakinan serta menghormati orang tua. Sikap toleransi tersebut merupakan modal sosial dan mampu diterjemahkan secara baik oleh masyarakat Waimangura dalam interaksi ber-masyarakat termasuk dalam pengelolaan *Kaliwu*, misalnya dengan menerapkan sanksi dari hukum-hukum adat Marapu apabila ada pelanggaran yang terjadi di lahan pemilik yang masih memercayai keyakinan Marapu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam perspektif sosiologis, *Kaliwu* tidak hanya dipandang sebagai sebuah entitas teknis berbentuk ekosistem, namun *Kaliwu* dimaknai pula sebagai sebuah realitas sosial yang terbentuk dari proses sosial yang panjang. Proses sosial tersebut melibatkan unsur-unsur sosial yang merupakan dasar pembentuk struktur sosial di masyarakat. Kaidah nilai tradisional, sistem pembagian kerja, dan manajemen konflik serta lembaga pemerintahan desa, kelompok tani, dan lembaga agama merupakan unsur-unsur sosial yang menonjol dan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan *Kaliwu* hingga saat ini.

B. Saran

Dalam melakukan penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat aspek teknis seperti ekologi dan biofisik saja, namun turut pula menempatkan aspek sosiologis di dalamnya. Untuk melestarikan dan mengaruh-utamakan sistem *Kaliwu* di tempat lain, perlu dilakukan inisiasi pencanangan desa model *Kaliwu* oleh stakeholders terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepala Desa dan warga Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (Eds.). (1979). *Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, T. (1985). *Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Berger, P. L. (1985). *Humanisme sosiologi*. Jakarta: Inti Aksara.
- Berger, P., Parera, F., & Luckman, T. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: risalah tentang sosiologi pengetahuan* (terj: Hasan Basri). Jakarta: LP3ES.
- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology: traditional ecological knowledge and management systems*. London: Taylor & Francis. Retrieved 1 Agustus 2015. <https://books.google.co.id/books?id=5b8RAgZtxxIC&printsec=frontcover&dq=sacred+ecology&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjRqJvPp9rRAhVMqI8KHY9DDeQ6AEIKjAB#v=onepage&q=sacred%20ecology&f=false>
- Druckman, D., & Fast, L. (2003). *Conflict: From analysis to intervention*. In Cheldelin, S, Druckman, D., & Fast, L (Eds.). London-New York: Continuum. Retrieved 24 April 2015 https://books.google.co.id/books?hl=en&l_r=&id=y5LUAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=Conflict+Analysis+Intervention+Sandra+Cheldelin&ots=Tk8p5CMHNo&sig=eQ5rapLc1EHCUWGMqrYT8vaHV3Arefr_esc=y#v=onepage&q=Conflict%20Analysis%20Intervention%20Sandra%20Cheldelin&f=false
- Gritten, D., Saastamoinen, O., & Sajama, S. (2009). Ethical analysis: A structured approach to facilitate the resolution of forest conflicts. *Forest Policy and Economics*, 11(8), 555-560. <http://doi.org/10.1016/j.forpol.2009.07.003>
- Hoult, T. F. (1969). *Dictionary of modern sociology*. The Unviersity of Michigan: Littlefield Adams.
- Kebijakan, W. (2003). *Perbutanan social*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Mitchell, C. R. (1981). *The structure of international conflict* (pp. 251-272) London: MacMillan Press Ltd.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2006). Sosiologi teks pengantar dan terapan. In Narwoko, J. D., & Suyanto, B (Eds.), *Sosiologi teks pengantar dan terapan* (pp. 74-96). Jakarta: Penerbit Kencana.
- Njurumana, G. N., & Susila, I. (2006). Kajian rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat berbasis sistem kaliwu di Pulau Sumba. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 3(1), 473-484.
- Njurumana, G., Raharjo, S., Pujiono, E., Prasetyo, B. Rianawati, H., & Puspiyatun, R. (2009). *Pengembangan agroforestry berbasis masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan* (Laporan Penelitian: Program Insentif Riset untuk Peneliti). Kupang: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional (Unpublished).
- Nurgiyantoro, Burhan, G., & Marzuki. (2004). *Statistik terapan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, S. A., Imam, M. H., Snelder, D. J., & Sunderland, T. (2012). Agroforestry for livelihood security in agrarian landscapes of the Padma floodplain in Bangladesh. *Small-scale Forestry*, 11(4), 529-538. <http://doi.org/10.1007/s11842-012-9198-y>
- Rahu, A. A., Hidayat, K., Ariyadi, M., & Hakim, L. (2014). Management of Kaleka (traditional gardens) in Dayak community in Kapuas, Central Kalimantan. *International Journal of Science and Research*, 3(3), 205-210.
- Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010). Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVI2(2), 84-91.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (Eds.). (1999). Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). *Setangkai bung sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Torres, B., Maza, O. J., Aguirre, P., Hijojosa, L., & Günter, S. (2015). The contribution of traditional agroforestry to climate change adaptation in the Ecuadorian Amazon: The chakra system. In *Handbook of Climate Change Adaptation* (pp. 1973-1994). Verlag Berlin Heidelberg: Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-642-38670-1_90.
- Usman, H., & Setiady, P. (2006). *Pengantar statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veeger, K. (1985). *Realitas sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Weiwei, L., Wenhua, L., Moucheng, L., & Fuller, A. M. (2014). Traditional agroforestry systems: One type of globally important agricultural heritage systems. *Journal of Resources and Ecology*, 5 (4), 306 - 313. <http://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2014.04.004>.